

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik wajib menjaga rahasia jabatannya yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris saat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai undang-undang. Akan tetapi, seringkali terjadi permasalahan hukum antara para pihak yang berakibatkan penyidik ingin memeriksa Notaris. Oleh karena itu, dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai badan yang berfungsi agar Notaris tidak dapat diperiksa secara semena-mena oleh penyidik. Namun, seringkali Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengizinkan pemeriksaan Notaris yang sudah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris dapat melakukan tindakan hukum menggugat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk melindungi dirinya sendiri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengajuan permohonan izin pemeriksaan terhadap Notaris oleh penyidik kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan. Selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memeriksa Notaris yang bersangkutan untuk menentukan jawaban atas permohonan pemeriksaan Notaris. Penentuan jawaban atas permohonan pemeriksaan Notaris diatur dalam Pasal 32 dan 33 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 dan pemenuhan syarat formil dalam proses pembuatan akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang tidak puas terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang menyetujui pemeriksaan Notaris dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai subjek gugatan dan keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai objek gugatan.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

A notary, as a public official authorized by the state to produce authentic deeds, is obligated to maintain the confidentiality of their position. This duty of confidentiality encompasses all information related to the deeds prepared by the notary in the course of performing their professional duties, in accordance with applicable laws. However, legal disputes between parties often lead to situations where investigators seek to question the notary. To prevent arbitrary examination by investigators, the Regional Notary Honorary Council was established as a body that ensures notaries cannot be subjected to investigation without proper oversight. Nevertheless, it is not uncommon for the Regional Notary Honorary Council to grant permission for the examination of a notary who has acted in accordance with the prevailing laws and regulations. In such cases, the notary may pursue legal action to challenge the decision of the Regional Notary Honorary Council in order to protect their legal rights. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. It utilizes both primary and secondary data. Data collection methods include interviews and literature review, and the data are analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that the mechanism for submitting a request to examine a notary begins when an investigator sends a formal request to the Regional Notary Honorary Council. The Council then reviews the notary concerned in order to provide a response to the request. The procedure for granting or denying such a request is regulated under Articles 32 and 33 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2021, which also outlines the formal requirements for the preparation of authentic deeds in compliance with existing legislation. A notary dissatisfied with the Council's decision to allow the examination may file an administrative lawsuit, with the Regional Notary Honorary Council as the defendant and the Council's decision as the object of the lawsuit.

Keywords: Notary, Regional Notary Honorary Council, State Administrative Court